



Drs. Seno Samodro
Bupati Boyolali



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019



M. Said Hidayat, SH
Wakil Bupati Boyolali

Bismillahirrohmanirrohim, Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Masyarakat Boyolali yang berbahagia,

Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada kesempatan ini perkenankanlah Kami menyampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2019 kepada masyarakat dan komponen yang ada di Kabupaten Boyolali.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat (Kemendagri dan kementerian terkait) melakukan evaluasi dan penilaian atas LPPD yang disampaikan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Mendagri melalui Gubernur. Hasil penetapan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh Pemerintah Daerah baik provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Bahwa Hasil penilaian EPPD tahun 2019 (*penilaian atas LPPD Tahun 2018*) Kabupaten Boyolali termasuk dalam kategori Pemerintah Kabupaten dengan status **kinerja Sangat Tinggi (ST)** dengan skor 3,619.

Secara garis besar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boyolali selama Tahun 2019 dapat Kami sampaikan sebagai berikut :

A. Kebijakan Pemerintah Daerah

1. Visi

Dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021. Dengan memperhatikan pada situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan memperhitungkan kontinuitas pelaksanaan pembangunan, maka telah ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-

2021 adalah: "**Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera**"

2. Misi, sebagai penjabaran dari visi :

Misi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut:

- a. Boyolali meneruskan semangat Pro Investasi.
- b. Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan.
- c. Boyolali bersih, berintegritas, sejahtera.
- d. Boyolali sehat, produktif dan berdaya saing.
- e. Boyolali lumbung padi dan pangan nasional.
- f. Boyolali kota susu, produsen daging dan hasil ternak/perikanan.
- g. Boyolali lebih maju dan berteknologi.

3. Panduan Arah Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) agenda utama arah pembangunan 2016-2021 yaitu :

Agenda pertama, pembangunan tata kelola Pemerintah dan pelayanan publik yang berintegritas, responsif, dan akuntabel.

Agenda kedua, pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Agenda ketiga, pembangunan sosial budaya masyarakat yang maju dan sejahtera.

Dalam rangka mencapai visi masyarakat maju dan lebih sejahtera, dalam 5 (lima) tahun ke depan Kabupaten Boyolali mencanangkan program unggulan pembangunan, yakni:

- a. Boyolali Kabupaten Cerdas (*Smart City*), sebagai kabupaten yang menerapkan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-governance*) melalui upaya antara lain Pengembangan *e-governance*, Pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT, Pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat dll.
- b. Boyolali Kabupaten Air (*Water City*), sebagai kabupaten yang mewariskan mata air kepada generasi yang akan datang;
- c. Boyolali Kabupaten Hijau (*Green City*), yaitu sebagai Kabupaten yang berketahanan menghadapi perubahan iklim dan antisipasi resiko bencana, serta pengembangan potensi ekonomi hijau.

4. Arah Kebijakan Dan Prioritas Daerah Tahun 2019

Tahap ini melanjutkan komitmen sebelumnya, penggunaan investasi diarahkan pengembangan geliat perekonomian masyarakat Kabupaten Boyolali dengan tetap menjaga orientasi perekonomian hijau (*Green Economy*). Geliat perekonomian juga diarahkan pada penggalian potensi khas yang dimiliki warga Kabupaten Boyolali dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial yang dimilikinya. Sektor ekonomi andalan adalah pertanian dan peternakan, peran khas Kabupaten Boyolali sebagai lumbung pangan nasional memberi dasar pengembangan menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem pertanian.

Program prioritas tahun 2019 secara garis besar diarahkan mendukung:

1. Implementasi regulasi daerah ramah investasi dan implementasi kerjasama pemerintah dengan swasta untuk peningkatan kapasitas pembangunan daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyolali Smart City; (ii) Boyolali Kabupaten Air; (iii) Boyolali Kabupaten Hijau; dan (iv) Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;
2. Penguatan kapasitas masyarakat mengoperasikan pelayanan berbasis teknologi, untuk mendukung prioritas Smart City;
3. Program pemenuhan rasio kecukupan sarana prasarana pemerintahan dan penunjang menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
5. Penguatan inovasi pengolahan hasil produksi dan pemasaran hasil pertanian, peternakan/perikanan, terintegrasi dengan pemasaran, pariwisata untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan;
6. Memperkuat partisipasi masyarakat dan optimalisasi kemandirian wilayah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing tinggi di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
7. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusifitas wilayah;
8. Pemasaran Citra Daerah, yaitu memasarkan popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali, di bidang pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan kebudayaan, termasuk nilai seni budaya, kawasan cagar budaya, dan peninggalan sejarah dan wisata religi.

Arah kebijakan yang dikembangkan pada tahun 2019 yaitu:

1. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur;

2. Peningkatan kondusifitas wilayah dan kesejahteraan sosial;
3. Peningkatan kesetaraan akses memperoleh pendapatan;
4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan;
5. Peningkatan daya saing industri yang berbasis sumber daya lokal;
6. Peningkatan daya saing perdagangan;
7. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian.

5. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan umum anggaran dalam mencapai hal tersebut meliputi implementasi anggaran berbasis kinerja dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

b. Kebijakan Umum Anggaran

Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali hakekatnya merupakan proses dimana Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki dan membentuk kemitraan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sasaran pembangunan antara lain : meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan perkapita, berkurangnya jumlah kemiskinan, berkurangnya jumlah pengangguran dan kesenjangan ekonomi baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah.

Dengan arah kebijakan tersebut, dapat digambarkan target serta realisasi APBD tahun 2019 Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

Kabupaten Boyolali sebagai berikut :

Tabel 1
Ringkasan Target dan Realisasi APBD Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2019 (*unaudited* BPK)

Uraian	Target	Realisasi
Pendapatan	2.330.495.203.000,00	2.357.487.210.573,00
Belanja	2.080.212.215.000,00	1.997.991.916.522,00
Transfer	388.209.346.000,00	383.609.948.217,00
Surplus/Defisit	(137.926.358.000,00)	(24.114.654.166,00)
Pembiayaan Netto	137.926.358.000,00	128.058.100.105,00

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	-	103.943.445.939,00
---	---	---------------------------

Sumber data: BKD Kabupaten Boyolali

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui struktur APBD dari sisi belanja Tahun Anggaran 2019 dan besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran untuk tahun anggaran 2019 unaudited BPK / belum diaudit yaitu Rp. 103.943.445.939,00.

c. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 data unaudited BPK sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2019 (unaudited BPK)

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ (KURANG) (Rp.)	%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	364.528.449.000,-	395.431.863.402,-	30.903.414.402,-	108,48
	a. Pajak Daerah	132.800.000.000	149.666.539.729,-	16.866.539.729,-	112,7
	b. Retribusi Daerah	17.714.669.000,-	21.088.974.161,-	3.374.305.161,-	119,05
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.950.961.000,-	13.970.406.527,-	19.3445.527,-	100,14
	d. Lain-lain PAD Yang Sah	200.062.819.000,-	210.705.942.985,-	10.643.123.985,-	105,32
	JUMLAH 1	364.528.449.000,-	395.431.863.402,-	30.903.414.402,-	108,48
2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA	1.880.918.382.000,-	1.872.257.957.642,-	(8.510.424.358,-)	99,54
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	1.451.998.543.000,-	1.436.635.314.225,-	(15.363.228.775,-)	98,94
	Bagi hasil pajak - LRA	43.166.440.000,-	36.177.413.491,-	(6.989.026.509,-)	83,81
	Bagi hasil Bukan pajak - LRA	2.377.276.000,-	1.414.243229,-	(963.032.771,-)	59,49
	Dana Alokasi Umum - LRA	1.045.669.922.000,-	1.045.669.922.000,-	0	100,00
	Dana Alokasi Khusus – LRA	360.784.905.000,-	353.373.735.505,-	(7.411.169.495,-)	97,95
	b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – lainnya – LRA	266.142.285.000,-	266.142.285.000,-	0	100,00
	c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	127.322.554.000,-	134.175.358.417,-	6.852.804.417,-	105,38
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi	35.455.000.000,-	35.305.000.000,-	(150.000.000)	99,58
	Jumlah 2	1.880.918.382.000-	1.872.257.957.642,-	8.660.424.358,-	99,54
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	85.048.372.000,-	89.797.389.529,-	4.749.017.529,-	105,58
	Pendapatan Hibah –LRA	85.048.372.000,-	89.797.389.529,-	4.749.017.529,-	105,58
	JUMLAH 3	85.048.372.000,-	89.797.389.529,-	4.749.017.529,-	105,58
	JUMLAH PENDAPATAN	2.330.495.203.000,-	2.357.487.210.573,-	26.992.007.573,-	101,16

Sumber data: BKD Kab. Boyolali.

Dari tabel tersebut dan data laporan anggaran dan realisasi (*unaudited* BPK) dari APBD, Pendapatan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.2.357.487.210.573,00 sehingga tercapai 101,16% atau lebih sebesar Rp.26.992.007.573,00 dari rencana target pendapatan tahun 2019.

d. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Tabel 3
Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2019 (unaudited BPK)

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	%
5	BELANJA	2.080.212.215.000,-	1.997.991.916.522,-	(82.220.298.478,-)	96,04
5.1	Belanja Operasi	1.523.194.262.000,-	1.466.732.795.862,-	(56.461.466.138,-)	96,29
	Belanja Pegawai	913.647.765.000,-	898.026.621.720,-	(15.621.143.280,-)	98,29
	Belanja Barang dan jasa	555.152.262.000,-	514.815.231.142,-	(40.277.030.858,-)	92,74
	Belanja Hibah	39.865.235.000,-	39.492.443.000,-	(372.792.000,-)	99,06
	Belanja Bantuan Sosial	14.529.000.000,-	14.338.500.000,-	(190.500.000,-)	98,69
5.2	Belanja Modal	555.017.953.000,-	530.593.843.520,-	(24.424.109.480,-)	95,60
	Belanja Tanah	35.392.102.000,-	31.599.383.176,-	(3.792.718.824,-)	89,28
	Belanja Peralatan dan Mesin	98.973.303.400,-	88.591.280.272,-	(10.382.023.128,-)	89,52
	Belanja Bangunan dan Gedung	189.791.686.000,-	184.815.082.330,-	(4.976.603.670,-)	97,38
	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	210.764.596.000,-	206.739.374.708,-	(4.025.221.292,-)	98,09
	Belanja Aset Tetap lainnya	17.779.265.100,-	16.653.057.734,-	(1.126.207.366,-)	93,67
	Belanja Modal Pengadaan Aset Tak Berwujud	2.317.000.500,-	2.195.665.300,-	(121.335.200,-)	94,76
5.3	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,-	665.277.140,-	(1.334.722.860,-)	33,26
6	Transfer	388.209.346.000,-	383.609.948.217,-	(4.599.397.783,-)	98,82
6.1	Transfer bagi hasil Pendapatan	15.051.567.000,-	11.021.120.500,-	(4.030.446.500,-)	73,22
6.1.1	Bagi Hasil Pajak Daerah	13.345.394.000,-	9.468.866.000,-	(3.876.528.000,-)	70,95
6.1.2	Bagi Hasil pendapatan lainnya(Retribusi)	1.706.173.000,-	1.552.254.500,-	(153.918.500,-)	90,98
6.2	Transfer bantuan keuangan	373.157.779.000,-	372.588.827.717,-	(568.951.283,-)	99,85
6.2.1	Tranfer Bantuan Keuangan ke Pemerin-tah Daerah lainnya	0,-	0,-	0,-	0
6.2.2	Transfer bantuan keuangan ke Desa	372.046.910.000,-	371.609.249.000,-	(437.661.000,-)	99,88
6.2.3	Tranfer Bantuan Keuangan lainnya	1.110.869.000,-	979.578.717,-	(131.290.283,-)	88,18
	Surplus/ (Defisit)	(137.926.358.000,-)	(24.114.654.166,-)	(113.781.703.834,-)	
7	PEMBIAYAAN				
7.1	Penerimaan Pembiayaan	159.262.358.000,-	156.494.100.105,-	(2.768.257.895,-)	98,26
	Penggunaan SiLPA	146.431.244.000,-	146.262.985.662,-	(168.258.338,-)	99,89
	Pinjaman dalam negeri	10.500.000.000,-	7.900.000.000,-	(2.600.000.000,-)	75,24
	Penerimaan kembali Piutang	2.331.114.000,-	2.331.114.443,-	443,-	100,00
7.2	Pengeluaran Pembiayaan	21.336.000.000,-	28.436.000.000,-	7.100.000.000,-	133,28
	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah daerah	10.836.000.000,-	10.836.000.000,-	0	100,000
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	10.500.000.000,-	17.600.000.000,-	7.100.000.000,-	167,62
	Pemberian Pinjaman Daerah				
	PEMBIAYAAN NETTO	137.926.358.000,-	128.058.100.105,-	(9.868.257.895,-)	92,85
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	103.943.445.939,-	-	

Sumber data: BKD Kab. Boyolali

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui struktur APBD dari sisi belanja Tahun Anggaran 2019 dan besarnya sisa lebih perhitungan anggaran untuk tahun anggaran 2019 *unaudited* BPK/ belum *diaudit* yaitu Rp.103.943.445.939,00. Data tersebut juga menggambarkan bahwa realisasi belanja tahun anggaran 2019 sebesar 96,04 % dengan target belanja sebesar Rp.2.080.212.215.000,00 dan realisasinya Rp.1.997.991.916.522,00, atau terjadi penghematan/efisiensi dan kondisi lain sebesar **Rp.82.220.298.478,00** atau 3,95%.

Realisasi belanja tersebut dikontribusi oleh Belanja Operasi target belanja sebesar Rp.1.523.194.262.000,00 dengan realisasi Rp.1.466.732.795.862,00 atau 96,29% sedangkan belanja Modal dari target belanja sebesar Rp.555.017.953.000,00 dengan realisasi Rp.530.593.843.520,00 atau 95,60%. Belanja Transfer target Rp 388.209.346.000,00 realisasi Rp 383.609.948.217,00 atau 98,82%. Sedangkan pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan dari target sebesar Rp.159.262.358.000,00 realisasinya sebesar Rp.156.494.100.105,00 atau 98,26%, sementara pengeluaran pembiayaan dari target Rp 21.336.000.000,00 dengan realisasi Rp.28.436.000.000,00 atau 133,28%.

B. Capaian Kinerja Makro

Gambaran secara umum Kabupaten Boyolali dan hasil pelaksanaan kebijakan umum maupun teknis yang dilaksanakan selama Tahun 2019 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Boyolali kurang lebih 101.510,10 hektar, yang secara administratif dibagi menjadi 22 (dua puluh dua) kecamatan terdiri 261 (dua ratus enam puluh satu) desa dan 6 (enam) kelurahan. Secara astronomis terletak pada posisi geografis antara 110^o22'-110^o50' Bujur Timur dan antara 7^o7' - 7^o36' Lintang Selatan.

2. Kondisi Geologi

Kabupaten Boyolali sebagian besar adalah dataran rendah dan dataran bergelombang dengan perbukitan yang tidak begitu terjal. Kabupaten Boyolali secara umum termasuk bagian lereng gunung api kuartir Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Sedangkan kondisi hidrologi, potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Boyolali dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi maupun kepentingan lainnya, baik alami

maupun buatan. Potensi hidrologi Kabupaten Boyolali terdiri 46 Sungai, 37 sumber mata air besar dan 51 waduk/embung. Dalam Penggunaan lahan untuk pertanian, telah ditetapkan Perda Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bahwa LP2B telah ditetapkan seluas 16.500,990 ha.

3. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Boyolali pada tahun 2018 berjumlah 1.026.034 jiwa dan tahun 2019 berjumlah 1.054.362 jiwa. Data ini memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk terjadi penambahan 28.328 jiwa. (Sumber data Dispendukcapil Kab.Boyolali).

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Kabupaten Boyolali tercermin dari pertumbuhan ekonomi apabila dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), secara agregat PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2019 apabila dibandingkan tahun 2018 terjadi kenaikan sebesar 8,08%. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2019 tumbuh 5,96% jika dibandingkan tahun 2018. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan BPS Kabupaten Boyolali, PDRB Boyolali tahun 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp.32.704.381.160,00 meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp 30.258.836.390,00. Jika dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2019 mencapai Rp.22.681.097.810,00 sedangkan pada tahun 2018 sebesar Rp.21.406.268.930,00. Inflasi tahun kalender 2019 di Kabupaten Boyolali sebesar 2,75%, dengan andil terbesar disumbangkan oleh kelompok bahan makanan sebesar 5,69%.

5. Aspek Kesejahteraan Rakyat

Salah satu fokus program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang secara eksplisit bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan di tingkat nasional. Berdasarkan tren perkembangannya, persentase penduduk miskin di Kabupaten Boyolali dalam 5 (lima) tahun terakhir (2013-2018) cenderung menurun. Pada tahun 2013 sebesar 13,27%, tahun 2014 sebesar 12,36%, tahun 2015 sebesar 12,45%, tahun 2016 sebesar 12,09%, tahun 2017 sebesar 11,96%, tahun 2018 ini sebesar 9,57% dan pada tahun 2019 sebesar 8,88% dengan jumlah rumah tangga miskin sebesar 93,700 jiwa.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Angka IPM Kabupaten Boyolali selalu meningkat dari dari Tahun ke Tahun dan angka terakhir pada Tahun 2018 yang terdiri dari beberapa indikator Angka Harapan Hidup (AHH) 75,79, Angka Harapan Sekolah (EYS) 12,16, Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) 7,55, Angka PPP (Ribu Rp) 12.760, IPM 73,22. Dimana IPM merupakan variabel bebas yang sifatnya statis, yaitu sebuah variabel yang perubahannya berlangsung sangat lambat dan akan meningkat/menurun sedikit demi sedikit sebagai respon terhadap perubahan berbagai kondisi fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. Untuk Tahun 2019 angka IPM belum dapat ditampilkan, karena proses penghitungannya dilaksanakan pada interval Bulan Juli – November 2019.

7. Penanaman modal

Capaian kinerja di bidang penanaman modal dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan yaitu tahun 2014 sebesar 57,50% tahun 2015 sebesar 23,88%, tahun 2016 sebesar 36,83%, tahun 2017 sebesar 14,63%, tahun 2018 sebesar 15,84% dan tahun 2019 sebesar 14,04%. Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi PMDN Tahun 2019 yaitu Jumlah Investor Masuk sebanyak 2.173 investor, Akumulasi Jumlah Investor sampai tahun 2019 sebanyak 9.824 investor, nilai realisasi investasi tahun 2019 Rp.1.479.945.458.306,00 dengan Akumulasi Jumlah Investasi sampai tahun 2019 sebesar Rp.10.535.261.518.235,00.

Perkembangan Investasi PMA di Kabupaten Boyolali tahun 2019 dengan jumlah Proyek Realisasi Investasi Rp.122.580.000.000,00 dengan Jumlah Investasi Kumulatif sampai tahun 2019 Rp.2.465.837.631.369,00 sedangkan jumlah Perusahaan PMA yang berinvestasi di Kabupaten Boyolali sampai akhir 2019 sebanyak 21 perusahaan dan 90 proyek.

8. Inovasi daerah

Inovasi yang telah diterapkan pada tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 ini telah melakukan inovasi-inovasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Inovasi di bidang infrastruktur
 - a) Kebijakan Tata Kota dg konsep “ *Smart City, Water City, dan Green City*”
 - Komplek perkantoran terpadu, tempat ibadah lima agama, alun-alun, museum, icon sapi ndekem.
 - Penataan lingkungan hidup dengan embung,sawah lestari, ruang terbuka hijau, dan kebun raya.

- Landmark Kota Simpang Lima Arjuna Wijaya, pusat industri, ekonomi, perdagangan, pembangunan jalan dan jalan baru serta Dome/Mahesa.
- b) Inovasi anggaran, mempertahankan komposisi Belanja Modal selalu meningkat tiap tahun 2015 Rp.320 M, Tahun 2016 Rp.380 M, Tahun 2017 Rp.411 M dan Tahun 2018 Rp.521 M, Tahun 2019 Rp.555 M.
 - c) Infrastruktur jalan dari 678,35 Km, 504,810 Km dalam Kondisi Baik.
 - d) Infrastruktur ekonomi, revitalisasi pasar tradisional, kawasan industry.
 - e) Infrastruktur sosial, menerima apresiasi dari Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) sebagai Pemerintah Daerah yang menyalurkan bantuan bagi Pondok Pesantren.
 - f) Infrastruktur Smart City dimulai dengan pembangunan data center, sinkronisasi berbagai sistem informasi, tanda tangan digital dengan konsep paperless, salah satu yang diunggulkan adalah Inovasi Bookless Library.
- 2) Inovasi pro investasi (Implementasi PTSP)
 - a) Penyediaan Sistem Pelayanan Perizinan yang Smart Anjungan Informasi (*touchscreen*) Aplikasi Peta Potensi; Perizinan Online; SMS Gateway; E–Document; Barcode; GIS Survey.
 - b) Pemanfaatan Sistem Informasi Perusahaan On Line (SIPO) yang difasilitasi Kementerian Perdagangan.
 - c) Penerapan SOP yang lebih sederhana, cepat, transparan dan akuntabel, Kawasan/Zona bebas korupsi.
 - d) Deregulasi terhadap 33 Perda menjadi 3 Perda.
 - e) Membebaskan retribusi seluruh 46 jenis perizinan, kecuali IMB.
 - 3) Inovasi bidang kesehatan
 - a) Public Service Centre/ PSC :
 - Layanan cepat kegawatdaruratan dengan menelpon 119, Dijemput, ditangani dirujuk secara gratis.
 - Menurunkan angka kematian, angka kecelakaan, dan menurunkan AKI dan AKB.
 - b) Antrian Regol Puskesmas :
 - 4) Inovasi e- Pangan

Sistem informasi pangan menjadikan pelaporan petugas lebih cepat, akurat, tepat waktu, membantu petani dan produsen,

masyarakat/ konsumen mengetahui setiap saat harga komoditas dari setiap kecamatan.

5) Inovasi Pilkadaes melalui e-votting

Pilkades e-voting telah dilaksanakan mulai tahun 2013 (8 Desa), tahun 2016 (15 desa), tahun 2017 (6 desa), dan pada tahun 2019 (69 desa). Inovasi ini telah banyak direplikasi oleh kabupaten lain.

6) Inovasi-inovasi lain diantaranya:

- a) BP3D (E-Laporan; Simonev; SIPD-Online; Sibangun; Monev RPJMD; ITR; Sakip; Sinangkis (sistem Penanggulangan Kemiskinan); SIGI (Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur).
- b) BKD (SIMDA Keuangan; SIMDA BMD; OTORI, SIPAD)
- c) Sekretariat Daerah (Aplikasi LKPJ dan LPPD; Aplikasi Perijinan dan Pelayanan Kecamatan; Sistem Pengendalian Pembangunan Berbasis TI; Aplikasi SPSE).
- d) DPUPR (Sistem Informasi Geografis Jalan; Aplikasi Pelaporan dan Aset).
- e) Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja (Kombo online).
- f) DISDIKBUD (Pendataan Ujian SD/MI; SMP/MTs; NPSN Satuan Pendidikan; Pendataan NPSN; Pendataan NISN; Dapodik).
- g) Dinas Kesehatan (Simpus; SPGDT)
- h) DISPENDUKCAPIL (SIAK; BENROLLER; BCARD Management; SIAK Konsolidasi Pusat; Duplicate NIK; Jateng Tools; SIPELANDUK; Pendamping Aplikasi SIAK);
- i) DISPERMASDES (Siskeudes, E-Voting)
- j) Dinas Perdagangan dan Perindustrian (E-Komodita).
- k) DPMPTSP (SIPO; Edoc; Aplikasi Peta Potensi; SMS Getway; Touchscreen; Carcode, GIS Survey; SIPP).
- l) DP3KBP3A (SIGA Prov. Jateng; SIDULGA; F/V/KB; INACEWS).
- m) Dinas Komunikasi dan Informatika (PPID; E-Klipping; Simdatel).
- n) Dinas Pertanian(E-Valuh; Simluhtan; Simpi; E-RDKK2; E-Komodita; Sibangun; E-Pangan; e-RDKK; SIM penyuluh Pertanian; SIM Kuota Subsidi Pupuk).

9. Prasarana dan Sarana Daerah

Prasarana dan sarana daerah di Kabupaten Boyolali menjadi prioritas penanganan, baik peningkatan kelas maupun rehabilitasinya guna memperlancar roda ekonomi daerah, gambaran kondisi prasarana dan sarana daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4
Kondisi Prasarana dan Sarana Kabupaten Boyolali
Tahun 2018 dan 2019

NO	INDIKATOR	2018	2019
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	73,96	74,46
2	Panjang Jalan (Km)	678,35	678,35
	- Kondisi Baik	501,43	504,810
	- Kondisi Sedang	77,48	54,814
	- Kondisi Rusak	62,94	42,,106
	- Kondisi Rusak Berat	36,5	76,620
3	Proporsi Jembatan dalam kondisi baik (buah)	426	426
	- Kondisi Baik	310	310
	- Kondisi Sedang/ringan	116	116
	- Kondisi Rusak Berat	0	0
4	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik (%)	84,73	88,31
5	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (m)	34.684	35.611,8

Sumber data: DPUPR Kabupaten Boyolali

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 900/228 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900/0245 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Boyolali bahwa jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 203 ruas jalan dan panjang jalan adalah 678,35 Km. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, untuk tahun 2019 menjadi sebesar 74,46% atau 504,810 Km dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 678,35 Km, atau naik 3,38 Km bila dibandingkan kondisi untuk tahun 2018, sehingga jalan kabupaten sampai akhir tahun 2019 dalam kondisi mantap (kondisi baik + kondisi sedang) sepanjang 559.624 Km. Untuk kondisi jalan rusak ringan dan rusak berat bertambah 19,286 Km.

Hasil penelusuran/validasi aset terhadap jembatan yang berada di ruas jalan kabupaten Jumlah jembatan sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 426 buah, kondisi jembatan sampai dengan tahun akhir 2019 dilihat dari konstruksi Lantai, Fondasi, Pilar dan Bangunan Atas dengan kondisi baik sebanyak 310 buah, sedangkan kondisi rusak sedang/ringan sebanyak 116 buah.

Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik untuk tahun 2018 sebesar 84,73% atau 8.321,3000 ha dari total luas irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Boyolali sebesar 9.820,7000 ha dan untuk tahun 2019 Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik menjadi sebesar

88,31%, atau 8.367,2800 ha. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan memperbaiki/merehab daerah irigasi yang memiliki potensi yang besar dan memiliki jangkauan yang luas bagi kelangsungan para petani.

Jumlah waduk / embung sampai dengan tahun 2018 sejumlah 43 buah embung. Tahun 2019 ada penambahan pembangunan embung sebanyak 8 buah embung dengan total kapasitas yang dibangun sebesar 83.134m³ dan total luas areal genangan 2,2900 ha.

Pembangunan 8 buah embung tersebut untuk pemenuhan air baku sebanyak 6 embung dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian 2 embung, sehingga total waduk / embung untuk kebutuhan irigasi sampai dengan tahun 2019 sejumlah 51 embung.

C. Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan

Untuk melaksanakan urusan ini ditempuh melalui 8 (delapan) urusan Wajib Pelayanan Dasar. Adapun sebagian informasi yang dapat kami sajikan, yaitu :

Tabel 5
Capaian Kinerja Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)
1. Pendidikan					
1	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	%	79,87	75,60	94,65
2	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A	%	101,00	101,60	100,59
3	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B	%	97,60	100,80	103,28
4	Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A	%	86,50	91,83	106,16
	Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B	%	71,50	75,75	105,94
5	Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	%	0,03	0,03	100,00
6	Persentase peserta didik SMP/SMPLB putus sekolah	%	0,20	0,09	155,00
7	Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan yang ke jenjang SMP	%	99	99,59	100,44
8	Persentase RK SD dalam kondisi baik	%	94,22	93,69	99,44
9	Persentase RK SMP dalam kondisi baik	%	98,10	88,90	90,62
10	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	%	56,14	55,30	98,50
11	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	%	67,95	73,10	107,58
12	Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD	%	18,25	13,73	75,23
13	Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP	%	19,25	16,91	87,84
14	Presentase Buta Aksara > 15 tahun	%	0,26	0,11	157,69

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)
2. Kesehatan					
15	Cakupan kunjungan bayi	%	87	99,96	114,90
16	Cakupan pelayanan anak balita	%	94	99,96	106,34
17	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/penduduk miskin	%	39,2	43,14	110,05
18	Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	%	90	86	95,56
19	Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Produksi, Makanan, dan Minuman	%	40	48	120,00
20	Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi	%	>75	> 84,27	112,36
21	Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	%	40	50,00	125,00
22	Cakupan respon aduan kegawatdaruratan kesehatan yang ditangani	%	90	100	111,11
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
23	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	73,84	74,00	100,00
24	Jembatan dalam Kondisi Baik	buah	10	10	100,00
25	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi baik	%	82,00	88,00	107,32
26	Kapasitas embung terbangun	m2	18.000,00	18.000,00	100,00
27	Terlaksana Program PAMSIMAS	paket	5	5	100,00
28	Jumlah siujuk terbit tepat waktu	dokumen	45,00	45,00	100,00
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
29	Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat yang kurang mampu	unit	1.310	2.394	182,75
30	Menurunkan kawasan kumuh	ha	1,65	39,77	2.410,30
31	Tercukupinya Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Unit	30,00	30,00	100,00
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat					
32	Tercapainya Kegiatan Operasi Tipiring, Cukai Tembakau, PKL dan Baliho/Iklan	Kegiatan	56,00	56,00	100,00
33	Terselenggaranya Kegiatan Patroli Wilayah, tertib Lalu Lintas Terpadu, PAM Lebaran, Natal 2019 dan Tahun Baru 2020	Kegiatan	117,00	117,00	100,00
34	Terlaksananya persiapan antisipasi menghadapi musim kemarau dan musim penghujan	Kegiatan	6,00	6,00	100,00
6. Sosial					
35	Meningkatnya pengetahuan anggota KUBE dan KRSE	orang	400,00	400,00	100,00
36	Tersusunnya data PMKS (BDT)	dokumen	1,00	1,00	100,00
37	Terpantaunya penerima manfaat PKH tepat sasaran	kecamatan	19,00	19,00	100,00

Sumber data: OPD Kab. Boyolali terolah

D. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang Dilaksanakan

Untuk melaksanakan urusan ini ditempuh melalui 17 (tujuh belas) urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar. Adapun sebagian informasi yang dapat kami sajikan, yaitu :

Tabel 6
Capaian Kinerja Kegiatan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)
1. Tenaga Kerja					
1.	Penempatan pencari kerja yang terdaftar	Orang	2.500,00	4.796,00	191,84
2.	Terbangunnya gedung balai latihan kerja	Unit	1,00	1,00	100,00
3.	Terwujudnya perusahaan yang mematuhi Perundang-Undangan dan perusahaan yang mengaji sesuai regulasi	Perusahaan	60,00	60,00	100,00
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
4.	Meningkatnya Jumlah Desa Layak Anak	desa	28,00	28,00	100,00
5.	Terfasilitasinya korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100,00	100,00	100,00
6.	Terlaksananya evaluasi Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	%	57,00	57,00	100,00
3. Ketahanan Pangan					
7.	Terwujudnya data dan informasi harga, akses, dan pasokan pangan	Bulan	12,00	12,00	100,00
8.	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	Prosentase	23,00	23,00	100,00
9.	Tersedianya informasi harga, akses, dan pasokan pangan	bulan	12,00	12,00	100,00
4. Pertanian					
10.	Tersusunnya database aset pemkab Boyolali berupa tanah kecamatan	paket	1,00	1,00	100,00
11.	Terbitnya ijin pengelolaan, pemanfaatan, pelepasan, dan alih fungsi tanah kas desa	Lokasi	10,00	11,00	110,00
5. Lingkungan Hidup					
12.	Meningkatnya persamaan dan persepsi dalam kriteria penilaian Adipura	kec	2,00	2,00	100,00
13.	Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	Pelaku usaha / kegiatan	50	50	100,00
14.	Terwujudnya lubang resapan biopori	unit	1.600,00	1.600,00	100,00
15.	Bertambahnya pelaku usaha peternakan yang mempunyai IPAL	Unit	15,00	15,00	100,00
6. Kependudukan & Catatan Sipil					
16.	Kelancaran operasional SIAK di Kabupaten Boyolali	Bulan	12,00	12,00	100,00
17.	Penerbitan dokumen kependudukan	Orang	95.000,00	134.189,00	141,25

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)
18.	Jumlah pemohon dokumen kependudukan	Dokumen	130.000,00	197.256,00	151,74
7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa					
19.	Ditetapkannya calon lokasi TMMD dan KBBT	Desa	6,00	6,00	100,00
20.	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dalam partisipasi pembangunan	Desa / Kelurahan	261,00	261,00	100,00
21.	Terpantaunya pelaksanaan LPMD	Unit	30,00	30,00	100,00
22.	Terpantaunya pertumbuhan BUMDes	Kecamatan	19,00	19,00	100,00
23.	Terisinya jabatan kepala desa	Jabatan	229,00	230,00	100,44
8. KB & KS (Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera)					
24.	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program KB-KS	kecamatan	22,00	22,00	100,00
25.	Meningkatkannya pengetahuan remaja/masyarakat tentang HIVAIDS	orang	200,00	200,00	100,00
26.	Jumlah PIK KRR aktif	Klp.	13,00	13,00	100,00
27.	Meningkatnya kemampuan tenaga pendamping Bina Keluarga	org	38,00	38,00	100,00
9. Perhubungan					
28.	Terpenuhinya sosialisasi kebijakan perhubungan terkait perbengkelan dan karoseri	bulan	12,00	12,00	100,00
29.	Terpilihnya pelajar pelopor keselamatan LLAJ di kabupaten boyolali	orang	3	3	100,00
30.	Tersedianya prasarana perhubungan	%	100,00	100,00	100,00
31.	Terselenggaranya kegiatan inspeksi keselamatan guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan	bulan	12,00	12,00	100,00
10. Komunikasi & Informatika					
32.	Web site dan sms center milik pemerintah daerah		Ada	Ada	100,00
33.	Terlaksananya penyebaran hasil-hasil pembangunan	bulan	12,00	12,00	100,00
34.	teraksesnya penyelenggaraan pemerintahan oleh publik	%	100	100	100,00
11. Koperasi & UKM					
35.	Meningkatnya UMKM yang melaksanakan pola kemitraan	UMKM	30,00	30,00	100,00
36.	Terlatihnya UMKM di bidang kewirausahaan (DBHCHT)	UMKM	30,00	30,00	100,00
37.	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit , tersalurnya informasi skim kredit dan fasilitas pembiayaan	KUMKM	40,00	40,00	100,00
12. Penanaman Modal					
38.	Meningkatnya promosi, pengembangan dan kerjasama investasi serta peningkatan jumlah investor	kali	983,00	2.223,00	226,14
39.	Terwujudnya laporan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal serta peningkatan koordinasi dan	perusahaan	50,00	50,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)
	sinkronisasi penanaman modal antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah				
40.	Meningkatnya realisasi investasi	rupiah	1.340.857.300.906	1.602.525.458.306	119,51
41.	Tersusunnya produk hukum daerah guna peningkatan pelayanan investasi	dokumen	2,00	2,00	100,00
13. Kepemudaan & Olahraga					
42.	Terseleksinya Paskibra Tk Kab./pengiriman ke Prov dan Tercukupinya Pakaian Paskibra	Kegiatan	1,00	1,00	100,00
43.	Terselenggaranya kompetisi olahraga (POPDA SD, SMP dan SMA/K)	Kegiatan	3,00	3,00	100,00
44.	Terselenggaranya lomba 28 KM	Kegiatan	1,00	1,00	100,00
14. Statistik					
45.	Terlaksananya sistem informasi statistik daerah	Kegiatan	1,00	1,00	100,00
46.	Terselenggaranya penyusunan buku PDRB Kab.Boyolali	Dokumen	1,00	1,00	100,00
47.	Tersedianya buku indeks harga konsumen	Dokumen	1,00	1,00	100,00
48.	Tersedianya buku nilai tukar petani	Dokumen	1,00	1,00	100,00
49.	Tersedianya buku indikator ekonomi dan statistik industri	Dokumen	1,00	1,00	100,00
15. Kebudayaan					
50.	Terselenggaranya Event Budaya	Kali	10,00	10,00	100,00
51.	Pelestarian budaya dan seni di Kabupaten Boyolali	kali	60,00	60,00	100,00
16. Perpustakaan					
52.	Terlaksananya supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat	bulan	12,00	12,00	100,00
53.	Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	bulan	12,00	12,00	100,00
17. Kearsipan					
54.	terlaksananya pembangunan data base informasi kearsipan	bulan	12,00	12,00	100,00
55.	terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	bulan	12,00	12,00	100,00

Sumber data: OPD Kab. Boyolali terolah

E. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

Untuk melaksanakan urusan ini ditempuh melalui 6 (enam) urusan Pilihan.

Adapun sebagian informasi yang dapat kami sajikan, yaitu :

Tabel 7
Capaian Kinerja Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)
1. Kelautan dan Perikanan					
1.	Cakupan produksi perikanan	ton	30.478,00	36.975,00	121,32
2.	Cakupan peningkatan pengolahan produksi hasil perikanan	ton	69,62	99,00	142,20
2. Pertanian					
3.	Terlaksananya asuransi usaha tani padi	ha	4.000,00	4.339,21	108,48
4.	Termonitornya kegiatan pendampingan pertanian/perkebunan oleh penyuluh pertanian lapang	kecamatan	22,00	22,00	100,00
5.	Tersusunnya informasi produksi dan harga komoditas pertanian dan perkebunan	kecamatan	22,00	22,00	100,00
6.	Tersusunnya program penyuluhan	dokumen	20,00	20,00	100,00
7.	Cakupan pengobatan/ vaksinasi	Ekor	5.000,00	5.000,00	100,00
8.	Cakupan peningkatan populasi ternak	ekor	2.065,00	2.065,00	100,00
9.	Cakupan peningkatan produksi hasil peternakan (daging sapi)	ton	8.345,00	8.345,00	100,00
3. Pariwisata					
10.	Terdata dan terverifikasinya pelaku usaha pariwisata serta memahami SKKNI	Kecamatan	22,00	22,00	100,00
11.	Terlaksananya event pariwisata di obyek pariwisata	lokasi	4,00	4,00	100,00
12.	Kemudahan dan terupdatenya data akses dan penyebaran informasi pariwisata.	tahun	1,00	1,00	100,00
4. Perdagangan					
13.	Tercapainya pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang	kecamatan	22,00	22,00	100,00
14.	Lokasi Pedagang Pasar, PKL, Asongan Yang Tertib Dan Tertata	UPT Pasar dan 2 Kecamatan	12,00	12,00	100,00
15.	Tersedianya pasar milik pemda yang representatif	UPT	12,00	12,00	100,00
5. Industri					
16.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Serta Tumbuhnya Calon Wirausaha Baru	IKM	60,00	60,00	100,00
17.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk serta tumbuhnya calon usaha baru di bidang IKM Logam	Orang	75,00	75,00	100,00
18.	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Produk Tembakau, Gula, Kelapa, Wawasan Mengenai Perijinan Produk, Motivasi Bagi Wirausaha Bagi IKM, Kemampuan SDM dan Mutu Produk IKM Makanan dan Minuman	IKM	175,00	175,00	100,00
6. Transmigrasi					
19.	Ditempatkannya peserta transmigrasi Untuk Memenuhi kebutuhan sdm	Kepala Keluarga	4,00	4,00	100,00
20.	Tersusunnya kebijakan	Tahun	1,00	1,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)
	dengan wilayah transmigrasi				

Sumber data: OPD Kab. Boyolali terolah

F. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang yang Dilaksanakan

Untuk melaksanakan urusan ini ditempuh melalui 7 (tujuh) urusan Pemerintah Fungsi Penunjang. Adapun sebagian informasi yang dapat kami sajikan, yaitu :

Tabel 8
Capaian Kinerja Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)
1. Administrasi Pemerintahan					
1.	Terpenuhinya administrasi perkantoran	bulan	12	12	100,00
2.	Terpenuhinya operasional perkantoran	bulan	12	12	100,00
3.	Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dan ditetapkan	Perda	12,00	22,00	183,33
4.	Surat Keputusan Bupati yang ditetapkan	Dokumen	420,00	729,00	173,57
5.	Peraturan Bupati yang diundangkan	Perbup	20,00	76,00	380,00
6.	Nilai survey kepuasan masyarakat kabupaten	Skor	78,00	81,97	105,09
7.	Tercukupinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan langganan koran	bulan	12	12	100,00
8.	Kelancaran pelaksanaan dan pengendalian pengadaan barang/jasa	Bulan	12,00	12,00	100,00
2. Pengawasan					
9.	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan kebijakan KDH	bulan	12,00	12,00	100,00
10.	Persentase pelaksanaan pemeriksaan regular terhadap seluruh objek pemeriksaan	Prosentase	23,00	23,00	100,00
11.	Laporan hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Laporan	8.000,00	8.000,00	100,00
12.	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	100,00
3. Perencanaan					
13.	Tersusunnya dokumen perencanaan OPD	%	100	100	100,00
14.	Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan dan pembangunan	%	100	100	100,00
15.	Tersusunnya laporan evaluasi pemabngunan, evaluasi, RPJMD, Aplikasi laporan, laporan bulanan dan triwulan, laporan monev, buku sebaran lokasi kegiatan	Dokumen	2,00	2,00	100,00
16.	Tertib administrasi KAD sehingga dapat meningkatkan potensi pengelolaan daerah melalui KAD	%	100	100	100,00
4. Keuangan					
17.	Tersedianya dokumen standar satuan harga murni dan perubahan	dokumen	2	2	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019 (%)
18.	Tersedianya pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD	dokumen	2	2	100,00
19.	Tersedianya Perda/Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dokumen	2,00	2,00	100,00
20.	Tersusunnya laporan evaluasi pelaksanaan APBD	laporan	4,00	4,00	100,00
21.	Terpenuhinya data aset daerah yang valid guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali	%	100,00	90,00	90,00
22.	Tersosialisasinya peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan daerah	Opd /upt	100,00	100,00	100,00
5. Kepegawaian					
23.	Persentase pemenuhan target dalam RB	%	100,00	100,00	100,00
24.	Tertatanya dokumen dan arsip kepegawaian	orang	8.709,00	8.709,00	100,00
25.	Terlaksananya fungsi operasional perangkat daerah	bulan	12,00	12,00	100,00
26.	Terpasang dan beroperasinya mesin absensi di setiap SKPD	unit	105,00	105,00	100,00
27.	Terbekalnya PNS yang akan memasuki masa purna tugas	orang	400,00	400,00	100,00
6. Pendidikan dan Pelatihan					
28.	Lulusnya peserta diklat PIM II, III dan IV	orang	11,00	11,00	100,00
29.	Tersusunnya dokumen AKD	kegiatan	1,00	1,00	100,00
30.	Jumlah PNS yang meningkat kompetensinya	orang	40,00	40,00	100,00
7. Penelitian dan Pengembangan					
31.	Inventor pemenang lomba krenova	inventor	2,00	2,00	100,00
32.	Kegiatan litbang dapat berjalan lancar dan optimal sehingga sasaran dan tujuan dapat tercapai	Bulan	12,00	12,00	100,00

Sumber data: OPD Kab. Boyolali terolah

G. Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan

Selain menyelenggarakan urusan desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga melaksanakan tugas-tugas pembantuan, yang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bidang. Penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Boyolali pada tahun 2019, meliputi:

1. Bidang Pertanian

Instansi pemberi tugas pembantuan, yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali. Anggaran tugas pembantuan pada bidang pertanian dialokasikan untuk Peningkatan

Produksi Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total anggaran Rp.3.910.651.000,00.

2. Bidang Koperasi

Kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan sebagai Dana Tugas Pembantuan pada DIPA Satker Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Jumlah anggaran pada Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro dengan total anggaran Rp.950.000.000,00.

3. Bidang Perdagangan dan perindustrian

Instansi pemberi tugas pembantuan, yaitu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembantuan, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali. Anggaran tugas pembantuan pada bidang perdagangan dialokasikan untuk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan kegiatan Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk yaitu pembangunan Pasar Ampel sebesar Rp.6.300.000.000,00 dan pembangunan Pasar Nogosari sebesar Rp.4.000.000.000,00.

4. Bidang Ketenagakerjaan

Kegiatan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 yang dialokasikan sebagai Dana Tugas Pembantuan pada DIPA Satker Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Jumlah anggaran pada Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan total anggaran Rp.253.768.000,00.

Masyarakat Boyolali yang berbahagia,

Disamping tugas pembantuan Pemerintah Kabupaten Boyolali juga menyelenggarakan tugas pemerintahan umum yang meliputi:

A. Kerjasama Antar Daerah, meliputi :

Kerjasama Antar Daerah, yaitu kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan beberapa pemerintah daerah lainnya, adapun forum yang telah terbentuk, antara lain :

- a. Melanjutkan kerjasama Subosukawonosraten;

- b. Kerjasama penempatan transmigrasi, daerah yang bekerjasama ialah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Gorontalo provinsi Gorontalo, Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tentang Kerja sama replikasi model inovasi daerah bidang pelayanan perizinan;
- d. Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Kerjasama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga, utamanya lembaga – lembaga yang kredibel selama ini *antara lain*, dengan:

1. Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tentang Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dari Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan dan Tentang Penempatan Peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis.
2. Kerjasama Daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
3. Kerjasama dengan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT).
4. Kerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
5. Kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG)
6. Kerjasama dengan Institusi Pendidikan dalam rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beberapa Universitas/Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta;

Pemerintah Kabupaten Boyolali terbuka untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak luar dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintah daerah, selain itu hasil dari kerjasama daerah dapat mempercepat implementasi prinsip *good governance* seperti semangat untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, *law inforcement*, akuntabilitas kinerja baik teknis maupun keuangan, pengembangan ekonomi masyarakat, dan peningkatan peran *Civil Society Organization* (CSO). Hal ini sejalan dengan Visi **“Pro Investasi Mewujudkan Boyolali Yang Maju dan Lebih Sejahtera”**

Manfaat dari kerjasama daerah dapat mengadopsi teknologi, manajemen, informasi, membangun kepercayaan dunia luar, guna meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan termasuk penghematan anggaran.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dengan instansi vertikal di daerah, diarahkan untuk :

- a. Terlaksananya suatu konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Terwujudnya persamaan persepsi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal.
- c. Terciptanya peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Boyolali dalam rangka pemantapan Otonomi Daerah.
- d. Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Terkait dengan hasil koordinasi yang melibatkan instansi vertikal di Kabupaten Boyolali bersama ini kami laporkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan unsur tersebut sebagaimana berikut :

- a) Kegiatan TMMD

Tabel 9
Waktu Pelaksanaan Kegiatan TMMD Tahun 2019

No	Kegiatan	Lokasi	Tahap Pelaksanaan
1	TMMD Sengkuyung I	Desa Ngleles, Kecamatan Juwangi	26 Pebruari – 27 Maret 2019
2	TMMD Sengkuyung II	Desa Jatisari, Kecamatan Sambu	11 Juli s/d 8 Agustus 2019
3	TMMD Reguler 106	Desa Sangup, Kecamatan Tamansari	2 Oktober s/d 31 Oktober 2019

Sumber data: Dispermasdes Kab. Boyolali

- b) Kegiatan KBBT

Tabel 10
Waktu Pelaksanaan Kegiatan KBBT Tahun 2019

No	Kegiatan	Lokasi	Tahap Pelaksanaan
1	KBBT I	Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel	23 Januari s/d 21 Pebruari 2019
2	KBBT II	Desa Benge, Kecamatan Wonosamudro	4 April s/d 3 Mei 2019
3	KBBT III	Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego	20 Agustus s/d 18 September 2019

Sumber data: Dispermasdes Kab. Boyolali

- c) Fasilitasi Pengadaan tanah untuk pembuatan jalur kereta api akses Bandara Adi Sumarmo lintas Solo Balapan - Bandara Adi Sumarmo seluas 114.762 m².
- d) Memfasilitasi dan melaksanakan program *Landreform*/redistribusi tanah-tanah obyek *landreform* yang berasal dari tanah negara bekas DC (*Drooge Cultuure*) yang sudah dikeluarkan surat keputusan hak miliknya oleh

Gubernur Jawa Tengah tetapi belum didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sebanyak 465 Bidang dengan luas 774.964 m².

- e) Memfasilitasi pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 yang meliputi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan anggota DPR Pusat, Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Boyolali dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Boyolali.

D. Pembinaan Batas Wilayah

Pelaksanaan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dibentuk Tim Penegasan Batas Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Boyolali. Pada Tahun Anggaran 2019, kegiatan yang dilaksanakan monitoring dan inventarisasi pilar batas daerah dilaksanakan sebagai tindak-lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Tabel 11
Lokasi Pilar Batas Kabupaten Boyolali
Dengan Daerah Perbatasan

No	Lokasi Pilar Batas Daerah Antara	Keterangan	
		Jumlah	Terletak Di Desa/Kel
1	Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten		
A	Kecamatan Sawit	3	Manjung 2, Tegalrejo 1
B	Kecamatan Teras	2	Doplang 2
C	Kecamatan Mojosongo	6	Manggis 2, Tambak 3, Singosari 1
D	Kecamatan Musuk	12	Keponsong 2, Karanganyar 2, Dragan 3, Lampar 4, Jemowo 1
2	Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Semarang		
A	Kecamatan Selo	1	Jrakah 1
B	Kecamatan Ampel	19	Jlarem 3, Ngadirojo 2, Kembang 1, Urutsewu 3, Ngampon 4, Gondangslamet 3, Ngenden 1, Selodoko 1, Ngargosari 1
C	Kecamatan Boyolali	1	Kebonbimo 1
D	Kecamatan Mojosongo	1	Dlingo 1
E	Kecamatan Sambu	3	Catur 1, Cermo 1, Nglembu 1
F	Kecamatan Simo	2	Pentur 1, Gunung 1
G	Kecamatan Karanggede	3	Pinggir 1, Tegalsari 2
H	Kecamatan Wonosegoro	7	Karangjati 2, Gilirejo 1, Jatilawang 1, Gunungsari 1, Repaking 2
3	Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Grobogan		
A	Kecamatan Wonosegoro	6	Repaking 4, Benge 2
B	Kecamatan Juwangi	27	Krobokan 3, Kalimati 2, Sambeng 3, Cerme 4, Juwangi 4, Jerukan 1, Kayen 4, Ngaren 1, Ngleles 4, Wonoharjo 1
C	Kecamatan Kemusu	8	Kedungmulyo 2, Wonoharjo 3, Ngleles 1, Wonoharjo 2
4	Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Karanganyar		
A	Kecamatan Nogosari	1	Jeron 1
B	Kecamatan Ngemplak	3	Kismoyoso 1, Donohudan 1, Gagaksipat 1
C	Kecamatan Banyudono	1	Batan 1

No	Lokasi Pilar Batas Daerah Antara	Keterangan	
		Jumlah	Terletak Di Desa/Kel
5	Kabupaten Boyolali dengan Kota Surakarta		
A	Kecamatan Ngemplak	5	Sawah 5
6	Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sragen		
A	Kecamatan Kemusu	3	Kedungrejo 2, Watugede 1
B	Kecamatan Andong	5	Kunti 1, Kedungdowo 1, Senggrong 1, Pakel 2
C	Kecamatan Nogosari	3	Pulutan 1, Ketitang 2
7	Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Magelang		
A	Kecamatan Selo	43	Jrakah 17, Klakah 6, Tlogolele 20
8	Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Sukoharjo		
A	Kecamatan Banyudono	5	Sambon 3, Kuwiran 2
B	Kecamatan Sawit	4	Kateguhan 1, Bendosari 2, Karangduren 1

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang memungkinkan potensi bencana antara lain : banjir, banjir lahar dingin, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, angin topan, kekeringan dan gempa bumi.

Tabel 12
Kejadian Bencana Alam
di Kabupaten Boyolali Selama Tahun 2019

NAMA KECAMATAN	FREKUENSI BENCANA / KEJADIAN								
	TANAH LONGSOR/GERAKAN TANAH	BANJIR	PETIR	ANGIN RIBUT	ANGIN HUJAN	KEBAKARAN HUTAN	KEKERINGAN	LAIN-LAIN	JUMLAH
SELO	8			1		1	4	13	
AMPEL	1								
CEPOGO	4			4	2		1	1	
MUSUK	4			1	1		3	4	
BOYOLALI	1	1		4	4		1		
MOJOSONGO				2	1				
TERAS	1	1			3				
SAWIT				2	2				
BANYUDONO		1		1	4				
SAMBI	3	1		4	1				
NGEMPLAK		4		2					
NOGOSARI		1		1	4				
SIMO	3	1		2					
KARANGGEDE	2			1			1		
KLEGO	2	2		1	2		2		
ANDONG	1				1		1		
KEMUSU		2		2	1		7	1	
WONOSEGORO	1	2		1	1		9	2	
JUWANGI		2	1	1	2		4		
GLADAGSARI	1	1				1	1		
TAMANSARI							6		

NAMA KECAMATAN	FREKUENSI BENCANA / KEJADIAN								
	TANAH LONGSOR/ GERAKAN TANAH	BANJIR	PETIR	ANGIN RIBUT	ANGIN HUJAN	KEBAKARAN HUTAN	KEKERING AN	LAIN- LAIN	JUMLAH
WONOSAMODRO					7		8		
JUMLAH	22	19	1	30	36	2	48	21	
Kerugian	350.000.000	816.272.000		558.000.000	582.500.000	500.000.000	800.000.000		3.606.772.000

Sumber data : BPBD Kab. Boyolali

Langkah-langkah penanggulangan bencana yang telah kami lakukan, yaitu : memberikan bantuan logistik dan penanganan kesehatan atau memberikan tanggap darurat, memberikan bantuan alat berat utamanya pada bencana tanah longsor, membuat laporan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah pusat, melakukan koordinasi ke samping utamanya kepada seluruh jajaran yang ada di Kabupaten Boyolali, dan menginstruksikan kepada pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan untuk segera melakukan penanganan darurat maupun penanganan lebih lanjut.

Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali didukung oleh PMI, FPRB, SAR, LKTS, Sabana, Orari, Tagana, KLM, ASA, KRI, Satgana, TDS, dan lain-lain.

Untuk mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan terjadinya bencana Pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, antara lain:

- a. Penetapan anggota TRC BPBD; Pemetaan daerah rawan bencana;
- b. Menyusun rencana kontingensi dan Rencana Penanggulangan Bencana;
- c. Membentuk Desa Tangguh bencana dan membentuk Sister Village (Desa Bersaudara), Rehabilitasi daerah rawan bencana; melengkapi sarana dan prasarana tanggap darurat;
- d. Pembentukan Posko Tanggap Darurat; Mengikuti rakor kebencanaan Tingkat Provinsi Jateng dan Nasional;
- e. Pembentukan Posko Tanggap Darurat; gladi penanggulangan bencana;
- f. Membuat Rencana Kontigensi; Sekolah Sungai.

F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Beberapa peristiwa yang terjadi di Kabupaten Boyolali tahun 2019 tidak berlarut dan tidak berkembang menjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum baik konflik horisontal maupun yang berdampak pada konflik vertikal. Hal ini dikarenakan telah dilakukan antisipasi dan penyelesaian konflik yang diambil cukup efektif dengan jalinan koordinasi solid dan kerjasama serta pelibatan

unsur aparat keamanan, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan serta *stakeholder* yang terlibat. Aparat keamanan yang terlibat adalah Polres Boyolali, Kodim 0724 Boyolali, Kompi B Batalyon 408, dan Denpor A Brimob Gunung Kendil.

Masyarakat Boyolali yang berbahagia,

Perlu kami sampaikan juga bahwa peningkatan mutu pelayanan dan penanganan permasalahan daerah dapat memberikan dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

1. Penanganan Masalah Kemiskinan

Dalam menangani masalah kemiskinan ditempuh melalui beberapa program dan kegiatan, antara lain :

- a. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai bulan Januari - Desember senilai Rp.110.000,00 bulan kepada 62.345 KPM, total Rp.81.346.320.000,00.
- b. Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2019 dikoordinasikan oleh TKPKD, dengan sumber anggaran APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten. Intervensi kegiatan yang kami lakukan, antara lain :
 - Bidang pekerjaan umum melalui bantuan pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan dengan Program Pamsimas.
 - Bidang kesehatan melalui Jaminan kesehatan keluarga miskin, bantuan operasional kesehatan dengan program Bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, Pelayanan kesehatan penduduk miskin.
 - Bidang pendidikan melalui Kejar Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional (KF), beasiswa bagi siswa gakin.
 - Bidang sosial diantaranya melalui penyaluran bantuan stimulan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), penyelenggaraan bimbingan dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang cacat dan PMKS, pendampingan PKH
 - Bidang perumahan diantaranya melalui penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 2.394 unit.
- c. Pemberian bantuan beasiswa dan BOS
Berikut siswa yang menerima Beasiswa dan BOS , pada semua tingkatan di Kabupaten Boyolali tahun 2019 :

Tabel 13
Siswa Penerima Beasiswa Pada Semua Tingkatan
Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	2	3
I	APBN (Pusat)	
	A. Dekon	
	1. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)	
	SMP:12.907 Siswa	7.575.000.000,00
	2. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP)	
	SD :48.753 Siswa	20.890.575.000,00
	TOTAL 1 + 2	28.465.575.000,00
II	APBD Kabupaten Boyolali	
	A. SD	
	1. Bantuan Keluarga Kurang Mampu (BKMM) SD : 3.000 Siswa @ 250.000;	750.000.000,00
	TOTAL	750.000.000,00
	B. SMP	
	1. Pemberian Beasiswa Keluarga Kurang Mampu SMP: 750 Siswa @ Rp. 500.000	375.000.000,00
	2. Pemberian Beasiswa Retrival SMP : 250 Siswa @ Rp. 700.000	175.000.000,00
	TOTAL	550.000.000,00
	TOTAL APBD KAB. BOYOLALI	1.300.000.000,00
	TOTAL BANTUAN TAHUN 2019	29.765.575.000,00

Sumber data : Disdikbud Kab. Boyolali

Dana BOS Tahun anggaran 2019 diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari-Desember 2019 untuk siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SD/SDLB : Rp.800.000,00/siswa /tahun
2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp.1.000.000,00/siswa/tahun

Jumlah anggaran BOS regular Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Anggaran BOS Regular Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Anggaran (Rp)
1	SD/SDLB	69.218	594	55.373.400.000
2	SMP/SMPLB/SMPT/SATAP	32.391	96	32.391.000.000
	Total	101.609	690	87.765.400.000

Sumber data : Disdikbud Kab. Boyolali

Dana BOS pendamping yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Boyolali, untuk jenjang SMP, SMP swasta sebesar Rp.50.000,00 siswa/tahun, dan untuk jenjang SD swasta sebesar Rp.30.000,00 siswa/tahun. Jumlah anggaran BOS pendamping Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15
Anggaran BOS Pendamping Kabupaten
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Jumlah Siswa	Jumlah Sekolah	Jumlah Anggaran (Rp)
1	SMP Swasta	6.130	44	306.500.000
2	SD Swasta	8.893	33	266.790.000
	Total	15.023	77	573.290.000

Sumber data : Disdikbud Kab. Boyolali

2. Kita patut berbangga bahwa atas upaya dan kerja keras seluruh komponen di Kabupaten Boyolali, selama Tahun Anggaran 2019 kita dapat mempertahankan dan meraih berbagai penghargaan atas prestasi yang dicapai baik ditingkat nasional maupun provinsi yang dapat mengharumkan nama dan citra Kabupaten Boyolali. Berbagai penghargaan atas prestasi tersebut, antara lain :
- 1) Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai Pemda Kabupaten dengan Predikat Terbaik 1 Nasional Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi secara Nasional Tahun 2019.
 - 2) Penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari Kemendagri kategori "Sangat Tinggi".
 - 3) Penghargaan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kemenpan kategori "Baik".
 - 4) Opini WTP atas hasil LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2018.
 - 5) Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori " Baik ".
 - 6) Kabupaten Sangat Inovatif pada Pengukuran Indeks Inovasi Daerah.
 - 7) Kabupaten/Kota Paling Aktif Melakukan Verifikasi dan Validasi Data.
 - 8) Juara II Tingkat Nasional, Pendamping RS Program Internsip Dokter Indonesia Paling Rajin.
 - 9) Kabupaten/Kota terupdate 10 dalam Membangun Pusat Inovasi Kepemimpinan Melalui Eproper (Inovasi Center) 2017 – 2019 tingkat Provinsi.
 - 10) BPP Mojosongo Sebagai Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2019.
 - 11) Srikandi Perubahan Indonesia Bidang Kesehatan.
 - 12) Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Provinsi Jawa Tengah Terbaik Tahun 2019.
 - 13) Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah sebagai Terbaik II untuk Kategori Efisiensi Kelembagaan Perangkat Daerah dan Manajemen Sumber

Daya Aparatur pada Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/
Kota di Jawa Tengah.

3. Untuk mewujudkan komunikasi yang efektif, Bupati membuka layanan SMS untuk masyarakat pada Nomor 081 393 499 911 sehingga masyarakat dapat menyampaikan aduan, kritik maupun saran dengan tidak harus bertemu dengan Bupati, dan setiap SMS akan ditindaklanjuti. Dengan dibukanya layanan ini secara nyata telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Boyolali dapat diakses melalui situs www.boyolali.go.id.

Masyarakat Boyolali yang berbahagia,

Pada kesempatan yang berbahagia ini tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Boyolali dan segenap komponen yang ada di Kabupaten Boyolali yang telah bersinergi dan memberikan dukungan serta dorongan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan masyarakat Boyolali yang maju, sejahtera berdaya saing dan pro investasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir batin kepada kita semua.

Sekian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Boyolali, 31 Maret 2020

